

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA DESA KEMUNINGSARI KIDUL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

SINTA SOFFIANA SAFITRI

NIM: E20193176

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2024**

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA DESA KEMUNINGSARI KIDUL**

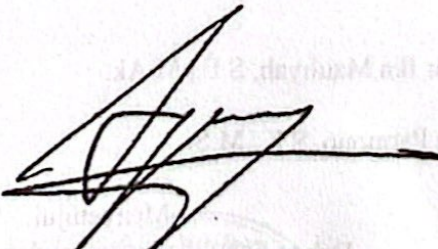
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sinta Soffiana Safitri
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: E20193176
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Agung Parmono, S.E, M.Si.
NIP. 197512162009121002

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA DESA KEMUNINGSARI KIDUL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
NIP.196905231998032001

Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, S.E., M.
NIP.199406302022032005

Anggota:

1 Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.

2 Agung Parmono, S.E., M.Si.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ...

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada allah, tuhaninya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun. (QS. Al-Baqarah : 282)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta Timur: 2022.

PERSEMBAHAN

Bersama dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hisayahnya sehingga karya tulis ini terselesaikan walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Dengan iringan raya syukur dan do'a ku persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Saifun Nuri dan Ibu R. Sulastri atas do'a dan kesabarannya, kasih sayang dan semangatnya yang tiada henti, yang telah berkorban segenap jiwa raga, do'a yang dipanjatkan setiap waktu hingga mengantarkanku pada pendidikan yang lebih tinggi serta menjadi motivatr dan penyemangat terhebatku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikanmu umur panjang keadaan sehat dan melimpahkan hidayahnya kepada keduanya aamiin.
2. Kepada saudara saya khususnya kakak sepupu saya M. Yusuf Zidan Karnival dan Zumrodatul Munafi'ah yang senantiasa memberikan semangat, kepada kedua adik saya Dwi Sylla Putri Intan Safitri dan Muhammad Afkar Nurdiyansyah semoga bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari saya. Semoga diberikan kesahatan dan rezeki yang melimpah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Desa Kemuningsari Kidul”**, di susun sebagai kelengkapan guna memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS JEMBER.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
2. Dr. Ubaidillah, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
3. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Sidiq.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah SE., M.Ak Selaku koordinator program studi Akuntansi Syari'ah.
5. Agung Parmono, S.E, M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan ketulusan telah menyediakan waktu, tenaga, maupun pikiran

untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Teman-teman khususnya Wina Nuralia dan Nurul Atikah Sari yang telah memberikan support dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Hj. Dewi Kholifah selaku Kepala Desa Kemuningsari Kidul yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian.
9. Semua Staf Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul yang telah berkenan untuk di wawancarai oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 27 Desember 2024
Penulis

Sinta Soffiana Safitri
E20193176

ABSTRAK

Sinta Soffiana Safitri, 2024: *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Desa Kemuningsari Kidul*

Kata Kunci: *Penerapan SAP, Laporan Keuangan, Basis Akruaal*

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan langkah krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan bukan hanya alat untuk memantau penggunaan anggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dengan adanya SAP, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga memberikan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. penerapan standar akuntansi pemerintahan sangat penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana penyusunan prosedur Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul?, 2) Apakah penyusunan Laporan Keuangan pada Desa Kemuningsari Kidul telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Berbasis Akruaal ?

Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui penyusunan prosedur Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul dalam Laporan Keuangan desa, 2) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa Kemuning Sari Kidul telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Berbasis Akruaal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan triangulasi sumber.

Dari data yang dikumpulkan diperoleh penerapan SAP pada Desa Kemuningsari Kidul sudah terlaksana dengan baik dan basis akuntansi yang dipakai belum menerapkan akuntansi akrual basic, untuk spesifikasi laporan keuangan Desa ini belum sepenuhnya melaksanakannya karena untuk penyajian laporan keuangannya desa hanya membuat Laporan Realisasi penggunaan dana desa saja yang dibuat oleh bendahara desa dan untuk basis akuntansi yang kita pakai belum memakai basis akuntansi yang akrual .

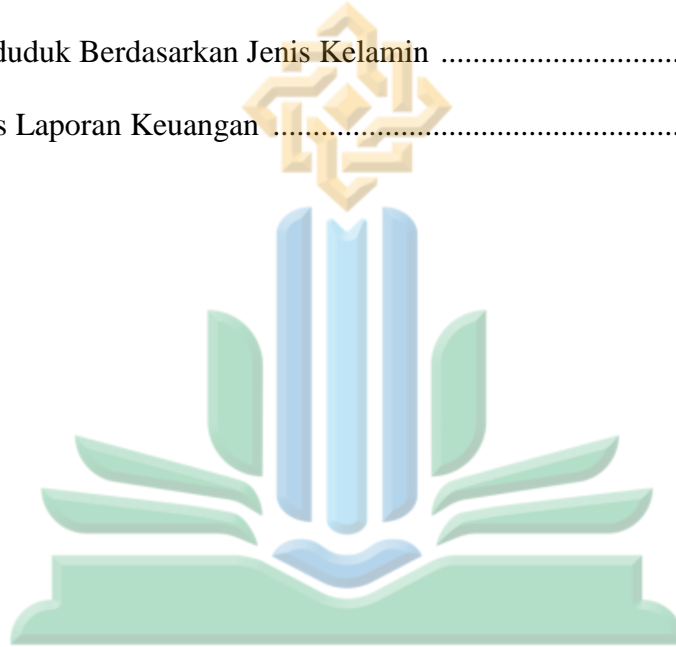
DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	29
1. Akuntansi Pemerintah	29
2. Konsep Akuntansi Pemerintah	31

3. Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintah	32
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP berbasis AkruaI	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	41
G. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Objek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis	53
C. Pembahasan Temuan	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.2 Jenis Laporan Keuangan	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Letak Geografis Desa Kemuningsari Kidul	45
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul	47
Gambar 4.3 LRA APBD	54
Gambar 4.4 ADD Kemuningsari Kidul	55
Gambar 4.5 Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemuningsari Kidul	57

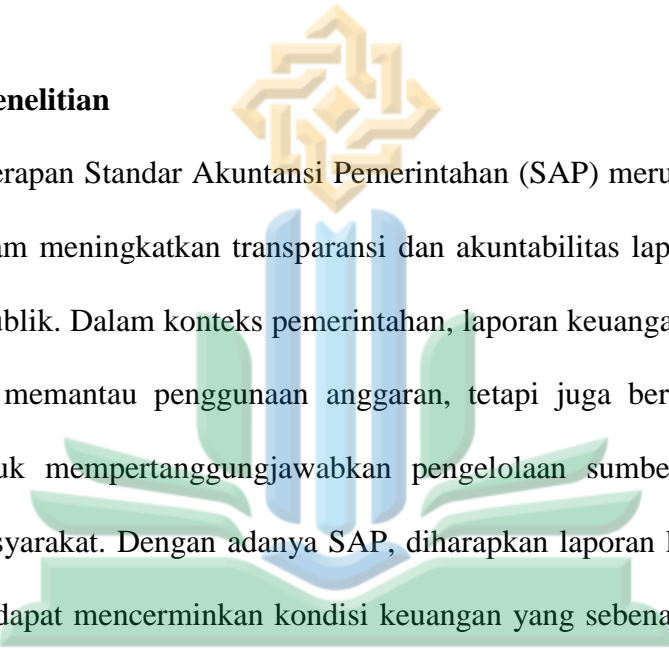


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan langkah krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan bukan hanya alat untuk memantau penggunaan anggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dengan adanya SAP, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga memberikan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan sangat penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Standar akuntansi pemerintahan dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas pemerintah mencerminkan kondisi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan standar ini membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, legislatif, dan lembaga pengawas.²

Dalam banyak kasus, penerapan standar akuntansi yang konsisten dapat mengurangi risiko penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu,

² Mardiasmo. (2018). "Akuntansi Pemerintahan". Yogyakarta: Andi.

analisis penerapan standar ini juga mencakup tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pusat dalam mengimplementasikan standar tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan, dan infrastruktur teknologi informasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu, penerapan standar ini juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di instansi pemerintah, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan SAP di berbagai entitas pemerintahan.³

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum). Penjelasan tersebut sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, dana desa dari APBN dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.⁴ Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah

³ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). "Laporan Hasil Pemeriksaan". Jakarta: BPK.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku saku Dana Desa", (Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017), h. 6

Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Kabupaten Jember adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 Kecamatan terdiri atas 28 Kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Desa Kemuningsari Kidul adalah salah satu dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Jember yang memiliki keunikan desain bangunan yang mirip dengan istana Negara di Jakarta, dimana dari fasilitas umum tersebut menggambarkan bagaimana desa ini telah mengalokasikan anggarannya dengan baik. Desa Kemuningsari Kidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Jenggawah yang memiliki visi misi desa yaitu menyediakan pelayanan informasi yang transparansi dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pemerintahannya Desa Kemuningsari Kidul memiliki sumber dana yaitu dari Pemerintah Daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dalam tahap laporan keuangan desa menggunakan basis kas untuk mengakui realisasi pendapatan anggaran. Metode basis kas mencatat transaksi saat uang benar-benar berpindah tangan. Sementara itu, basis akrual mencatat transaksi saat transaksi itu sendiri terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau

dibayar. Perbedaan mendasar antara basis kas dan akrual memiliki implikasi yang signifikan dalam evaluasi kinerja keuangan. Pemerintah seharusnya menggunakan basis akrual dalam laporan keuangannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Basis akrual dalam akuntansi adalah basis yang mematuhi peraturan pelaporan keuangan. Namun penerapan basis akrual diterapkan secara bertahap melalui proses transisi karena penerapan basis akrual secara penuh pada sistem akuntansi keuangan daerah memerlukan banyak perubahan di bidang teknologi dan sumber daya manusia. Sesederhana apapun perubahannya, setiap perubahan akan selalu membawa dampak baik positif maupun negatif. Tidak dapat dipungkiri, akan timbul permasalahan-permasalahan baru akibat beralihnya sistem akuntansi keuangan daerah dari yang tadinya *single entry* berbasis kas dan mapan menjadi *double entry* berbasis akrual.

Penerapan sistem akrual bertujuan untuk mengatasi lebih dari sekedar bentuk dan standar penyajian laporan keuangan. Namun, hal ini juga mempengaruhi penyesuaian yang dilakukan terhadap sistem penganggaran. Selain itu, sistem dan pengukuran kinerja pemerintah pun mau tidak mau akan terkena dampak penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Dengan kata lain, perkembangan sistem akuntansi pemerintahan akan mempengaruhi kebijakan fiskal dan kinerja pemerintah di masa depan selain mengubah struktur akuntabilitas keuangan.

Namun pada praktiknya, pemerintah menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Akuntansi anggaran pemerintah seharusnya mengikuti basis akrual jika mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual. Mengenai sistem akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual saat ini, hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat umum.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Desa Kemuningsari Kidul “**

B. Fokus Penelitian

Pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi dari suatu variabel penelitian tetapi dirumuskan untuk mengetahui gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, atau kemungkinan ditemukan teori bar.⁶ Berdasarkan Gambaran latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengemukakan masalah yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan prosedur Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul?
2. Apakah penyusunan Laporan Keuangan pada Desa Kemuningsari Kidul telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Berbasis Akrual ?

⁵ Risnaningsih, "Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual", Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, 2022

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2016), 209-210`

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada masalah yang dirumuskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyusunan prosedur Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul dalam Laporan Keuangan desa,
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa Kemuning Sari Kidul telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Berbasis AkruaI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah praktis dan teoritis.

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi strata satu jurusan akuntansi syari'ah di UIN KHAS JEMBER, sekaligus menambah pengetahuan dan implementasi teori-teori yang didapat selama perkuliahan.
 - b. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai rujukan khususnya dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama dibidang Akuntansi Sektor Publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang lebih luas dari bahasan ini.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjadikan titik perhatian dan fokus utama dalam menemukan kata kunci untuk mengeksekusi penelitian di lapangan, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna dan menghindari terjadinya ambiguitas dalam penelitian. Berikut definisi pokok yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan antar Generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

d. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 1) Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)

Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di daerah maupun di pusat menjadi fenomena dalam perkembangan sektor publik di Indonesia. Penerapan basis akrual bukan merupakan kesukarelaan semata, ini merupakan amanat dari undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara, sehingga basis akrual pada akhirnya harus diterapkan

bagi seluruh pemerintah daerah maupun pusat. SAP Berbasis AkruaI merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dari pasal 36 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dari pasal 70 ayat 2, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 harus diganti. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan basis akuntansi dari basis kas menuju akruaI menuju basis akruaI penuh yang digunakan saat ini berpengaruh dalam perubahan komponen laporan keuangan pemerintahan, baik itu dalam pelaksanaan anggaran, dan laporan finansial, sehingga seluruh komponennya menjadi sebagai berikut:⁷

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggara dan realisasinya dalam satu periode pelaporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsurunsur :

- 1) Pendapatan LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/defisit LRA
- 5) Pembiayaan
- 6) Penerimaan pembiayaan sisa lebih/kurang

⁷ Syahril Effendi, Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintahan Daerah (CV Batam Publisher, 2021) hal. 8-36

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan ini merupakan salah satu laporan yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan pokok pada basis kas. Pos-pos dalam SAL sebagai berikut :

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- 3) SiLPA/SiKPA tahun berjalan
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan periode sebelumnya
- 5) Saldo Anggaran Lebih akhir
- 6) Lain-lain

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menunjukkan kinerja suatu entitas dalam satu periode. Unsur-unsur yang ada didalam laporan operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Laporan Operasional
- 2) Beban dari kegiatan Operasional
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non-operasional
- 4) Pos luar biasa
- 5) Surplus/defisit Laporan Operasional

d. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas yang dimana laporan tahun berjalan dibandingkan dengan laporan

tahun sebelumnya. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas sebagai berikut :

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit Laporan Operasional pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

e. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca sebagai berikut :

- 1) Aset, sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang
- 2) Kewajiban, utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk/keluar untuk pemerintah
- 3) Ekuitas, kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih dari aset dikurangi kewajiban pemerintah

f. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah dalam periode tertentu. Unsur-unsur yang dicakup dalam laporan arus kas sebagai berikut :

- 1) Arus kas dari aktivitas operasi
 - 2) Arus kas dari aktivitas investasi
 - 3) Arus kas dari aktivitas pendanaan
 - 4) CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)
- g. CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)

Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan interpretasi dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh suatu entitas. CaLK mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

Mengungkapkan informasi umum terkait entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

- 1) Menyajikan informasi terkait kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- 2) Menyajikan informasi tentang dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan.
- 3) Menjelaskan perincian masing-masing pos pada lembar muka laporan keuangan.
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum dilaporkan dalam lembar muka laporan keuangan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, serta analisis dan pembahasan temuan dari lapangan.

BAB V berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengidentifikasi berbagai temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan juga memberikan gambaran penelitian mana yang sudah dipublikasikan atau belum. Karena ada beberapa aspek yang perlu disebutkan dalam penelitian sebelumnya, maka peneliti harus meninjau kembali berbagai hasil penelitian sebelumnya. Dengan mempraktikkan tahapan-tahapan ini, menjadi jelas seberapa dapat diterapkan orisinalitas dan status penelitian tersebut.⁸

Penelitian terdahulu yang akan saya review berisi nama penelitian, judul penelitian, hasil penelitian, dan letak perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan.

Berikut beberapa referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan :

1. Penelitian terdahulu selanjutnya yang digunakan berjudul “Evaluasi penyajian laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010”⁹ di teliti oleh Frenly Rombbunga, David PE Saerang, Novi Swandari Budiarmo (2018), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember, 2019), 46.

⁹Frenly Rombbunga, David PE Saerang, Novi Swandari Budiarmo, “Evaluasi penyajian laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010”, *JURNAL RISET AKUNTANSI* 13 (04), 2018

penyajian laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diambil adalah sejarah dan perkembangan instansi, tujuan instansi, struktur organisasi instansi, kondisi geografis dan batasan, visi dan misi instansi, serta Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif eksploratif. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian membandingkan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung dengan laporan keuangan sesuai dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP. 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah PP. 71 Tahun 2010, meski belum optimal, karena ada beberapa poin yang masih belum lengkap dalam pelaporan keuangan seperti Laporan Anggaran Perubahan Saldo (SAL). Dari dua puluh tiga paragraf yang mengatur laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung terdapat dua puluh paragraf yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP. 71 Tahun 2010. Tiga paragraf yang belum diterapkan masuk dalam laporan Rincian Anggaran Perubahan Anggaran Lebih (SAL).. Perbedaan yang terdapat pada penelitian adalah penelitian terdahulu mengevaluasi sedangkan penelitian ini menganalisis.

2. Penelitian berikutnya berjudul “Evaluasi penerapan system pengendalian penerimaan kas (study kasus pada dinas pendapatan daerah Kota Manado)”¹⁰ diteliti oleh Venna Maria, Jantje tinangon dan Novi S. Budiarmo (2018), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan dalam perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel dan transparan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Melaksanakan sistem pengendalian penerimaan kas untuk mengontrol jalan pelaporan penerimaan kas dan kegiatan lainnya. Penerapan sistem pengendalian penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan. Pada penelitian sebelumnya mengevaluasi penerapan sistem pengendalian penerimaan kas sedangkan penelitian ini meneliti laporan keuangan.

¹⁰ Venna Maria, Jantje tinangon dan Novi S. Budiarmo, “Evaluasi penerapan system pengendalian penerimaan kas (study kasus pada dinas pendapatan daerah Kota Manado)”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 16 (3), 2018

3. Penelitian berikutnya berjudul “Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Jombang“¹¹ diteliti oleh M. Dimas satrio, Indrawati Yuhertina, dan Ardi Hamzah (2018), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam aspek komitmen, regulasi dan kebijakan, pengelolaan SDM dan pengelolaan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPKD dan SKPD. Data dianalisis menggunakan pendekatan interpretif yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pimpinan beserta jajaran SKPD memiliki komitmen dalam implementasi SAP berbasis akrual. Perangkat regulasi dan kebijakan juga telah dibuat, disosialisasikan dan diimplementasikan. Dalam pengelolaan SDM telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola keuangan SKPD. Sedangkan dalam pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Jombang telah bekerja sama dengan BPKP dalam penyediaan aplikasi keuangan SIMDA. Namun dari ketiga aspek tersebut masih terdapat kendala-kendala yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut mengimplementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

¹¹ M. Dimas satrio, Indrawati Yuhertina, dan Ardi Hamzah, “Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Jombang”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan 18 (1) 59-70, 2018

sedangkan penelitian ini menganalisis kesesuaian penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

4. Berikutnya penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung dan beban dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Bitung”¹², nama peneliti Jenny (2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pencatatan dan pelaporan belanja langsung serta beban yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai acuannya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi untuk pengumpulan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung telah melakukan proses pencatatan akuntansinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung sebaiknya untuk tahun Anggaran dalam pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman sepenuhnya pada aturan-aturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar efektif dapat terwujud, Laporan Keuangan yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut., penelitian sebelumnya menganalisis pencatatan dan pelaporan belanja

¹²Jenny Billy Massie, “ Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja LAngsung dan Transmigrasi Kota Bitung “, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 4 (2), 2018

langsung dan beban sedangkan penelitian ini mengabalisis penerapan standar akuntansi.

5. Penelitian terdahulu dengan judul penelitian, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara"¹³ oleh penelitian Billy Rivaldi Panggalila, Sifrid S. Pangemanan, Jessy D. L, Warongan (2018), Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, hasil penelitian menggambarkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai berdasarkan peraturan-peraturan Akuntansi Pemerintah Yang Berlaku dan perlu adanya penggantian nama akun pada laporan perubahan ekuitas. Perbedaan penelitian terhadulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah peraturan yang di gunakan, disini peneliti menggunakan PP No. 71 tahun 2010 sedangkan peneliti terdahuku menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013.

¹³Billy Rivaldi Panggalila, Sifrid S. Pangemanan Jessy D. L, Warongan, " Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara " Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04, 2018

6. Penelitian terdahulu berikutnya yakni yang berjudul “Analisis Penerapan Basis AkruaI Atas Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputan Timur)”¹⁴ oleh peneliti Yunita Kurnia Shanti (2018), Penelitian ini menganalisis penerapan basis akruaI atas SAP No 71 tahun 2010 dan mengetahui dampak penyajiann laporan keuangan pada SKPD Kecamatan Ciputat Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pengamatan, wawancara, analisis dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan basis akruaI pada penyajian kelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP 71 tahun 2010. Sedangkan letak perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan hanya meneliti kesesuaian laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010.
7. Penelitian berikutnya berjudul “Analisis Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang”¹⁵ terdapat beberapa peneliti Sri ratna Dwi Lestari, Arik Susbiyani (2019), permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang laporan Operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁴Yunita Kurnia Shanti,” Analisis Penerapan Basis AkruaI Atas Satandar Akuntansi Pemerintah No. 71 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputan Timur) “ Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1,No.1, 2018

¹⁵ Sri ratna Dwi Lestari, Arik Susbiyani, “ Analisis Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang “,(Skripsi,Universitas Muhammadiyah Jember, 2018) 2019

kesesuaian penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP No. 12. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama dibidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang berupa Laporan Operasional tahun anggaran 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif (*Deskriptive Analisis Method*) yaitu suatu metode yang menggambarkan terlebih dahulu mengenai pencatatan, pengakuan serta pelaporan pendapatan dan beban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yang kemudian disesuaikan dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan PSAP No. 12. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan, pengakuan serta pelaporan pendapatan dan beban yang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan.

8. Peneliti berikutnya berjudul “Analisis Penerapan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional Pada Inspektorat Kabupaten Jayapura”¹⁶, diteliti oleh Rini Indah Wati (2020), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian Laporan Operasional yang ada pada Inspektorat Kabupaten Jayapura telah sesuai atau tidak sesuai dengan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode komparatif. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian Laporan Operasioal pada Inspektorat Kabupaten Jayapura secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional, perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada metode penelitian yang digunakan.
9. Penelitian terhadulan yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Bakorwil III Malang”¹⁷ terdapat bebrapa peneliti yakni : Choirotul Ummayyah, Ana Sopanah, Hartini P. Pawestri (2022), Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang pada tahun 2019 apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi

¹⁶ Amelia Fahira, “ Analisis Penerapan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional Pada Inspektorat Kabupaten Jayapura “, Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting, Vol. 1 No. 1 Mei 2020

¹⁷Choirotul Ummayyah, Ana Sopanah, Hartini P. Pawestri,” Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Bakorwil III Malang “, *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)* 2 (1), 766-773, 2022

Pemerintah atau belum. Analisis ini meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Hasil penelitian ini yaitu Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang telah menerapkan secara penuh Standar Akuntansi Pemerintah atas laporan keuangan tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan klasifikasi akun-akun yang digunakan dan format penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dari objek yang diteliti, penelitian terdahulu meneliti pertanggungjawaban laporan keuangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti penyesuaian laporan keuangan.

10. Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang”¹⁸ diteliti oleh Yohana Cresensia Mutiara, Minarni A Dethan, dan Nikson Tameno (2022), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pendekatan

¹⁸Yohana Cresensia Mutiara, Minarni A Dethan, dan Nikson Tameno, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1 (7), 2022

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 namun ada beberapa unsur dalam PSAP Nomor 02 yang masih belum diterapkan dalam laporan realisasi anggaran. Jadi PSAP Nomor 02 belum diterapkan secara maksimal dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus peraturan yang digunakan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Frenly Rombebunga, David PE Saerang, Novi Swandari Budiarto (Jurnal Riset Akuntan S1 13 (04)), 2018	Evaluasi penyajian laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010	Menggunakan PP No. 71 tahun 2010, data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi	Perbedaan yang terdapat pada penelitian adalah penelitian terdahulu mengevaluasi sedangkan penelitian ini menganalisis
2	Venna Maria, Jantje Tinangon, dan Novi S. Budiarto (Jurnal Berkala Ilmiah	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Penerimaan Kas (Study kasus pada dinas pendapatan daerah kota	Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif	Pada penelitian sebelumnya mengevaluasi penerapan system pengendalian penerimaan kas sedangkan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Efisiensi 16 (3) 2018	Manado)		penelitian ini menganalisis laoran keuangan
3	M. Dimas Satrio, Indrawati Yuhernia dan Ardi Hamzah (Jurnal Akuntansi dan Keuangan 18 (1) 59-70) 2018	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang	Sama-sama menganalisis standar akuntansi pemerintah, pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi	Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut mengimplementas i standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sedangkan penelitian ini menganalisis kesesuaian penerapan PP No. 71 tahun 2010
4	Jenny (Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi 4 (2)) 2018	Analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung dan beban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Bitung	Menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, berdasarkan pada PP No. 71 tahun 2010	Penelitian sebelumnya menganalisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung dan beban sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan standar akuntansi
5	Billy Rivaldi Panggalila, Sifrid S. Pangemanan, Jessy D. L, Warongan (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16 No. 04) 2018	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	Menggunakan PP No. 71 tahun 2010, menggunakan metode deskriptif kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah peraturan yang digunakan, disini peneliti menggunakan PP No. 71 tahun 2010 sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				No. 64 Tahun 2013
6	Yunita Kurnia Shanti (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol. 1 No. 1) 2018	Laporan Keuangan (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputan Timur)	Menggunakan metode deskriptif kualitatif, menganalisis penerapan basis akrual atas SAP No. 71 tahun 2010	Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan hanya meneliti kesesuaian PP No. 71 tahun 2010
7	Sri Ratna Dwi Lestari, Arik Susbiyani (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember) 2019	Analisis Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	Menggunakan PSAP No. 12 tentang laporan operasiaonal, sama-sama menganalisis	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan
8	Rini Indah Wati (Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting, Vol.1 No.1) 2020	Analisis Penerapan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional Pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Penelitian menggunakan PSAP No. 12, Pengumpulan data penelitian berupa data primer dan data sekunder	Perbedaan denagn penelitian terdahulu yakni tempat penelitian yang dilakukan terdahulu melakukan penelitian pada inspektorat Kabupaten sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintahan desa
9	Choirotul Ummayyah, Ana Sopannah, Hartini P. Pawestri (Widyagama National Conference on Economics and Business) 2022	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Laporan Keuangan di Bakorwil III Malang	Menggunakan metode yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif, sama-sama menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dari objek yang diteliti, penelitian terdahulu meneliti pertanggungjwaban laporan keuangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				meneliti penyesuaian laporan keuangan
10	Yohana Cresensia Mutiara, Minarni A. Dethan, dan Nikson Tameno (Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1 (7)) 2022	Penerapan Pernyataan Stabdard Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	Meneliti PSAP, menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, sumber data primer dan sekunder, serta pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus peraturan yang digunakan

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Akuntansi Pemerintah

Menurut *American Accounting association* defenisi akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.¹⁹

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang

¹⁹ Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan*, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta: Kencana, 2010, h.5

dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan.²⁰

Dalam kedua defenisi tersebut dapat diketahui bahwa:

- a. Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.
- b. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial/perusahaan (*comersial accounting*), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*), dan akuntansi sosial (*social accounting*). Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Sedangkan akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi, seperti neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan dan produksi nasional, serta neraca nasional yang khusus diterapkan dalam lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.

²⁰ Abdul Halim, *Akuntansi sektor publik*, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat, 2007, h.32

2. Konsep Akuntansi Pemerintah

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggung jawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberiinformasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepatselama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakaninformasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.²¹ Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*Good Governance*), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah.²²

²¹ Deddi Nordiawan, "Akuntansi Sektor Publik", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 201

²² Khairul Ikhwan Damanik, "Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.95

3. Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintah

Meskipun ada dua basis akuntansi yaitu kas (LRA) dan akrual (LO dan Neraca), namun hanya satu persamaan akuntansi yang digunakan. Karena unsur ekuitas terbentuk dari transaksi kas (realisasi anggaran) dan transaksi yang bersifat akrual. Sehingga persamaan yang digunakan untuk dasar pencatatan adalah²³:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas} + (\text{Pendapatan} - \text{LO} - \text{Beban})$$

Persamaan akuntansi ini digunakan dalam basis akrual akan menghasilkan Laporan Operasional.

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadinya atau pada saat perolehan. Akuntansi akrual sebagai metodologi dalam akuntansi yang mengakui transaksi berdasarkan aktivitas ekonomi bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan.²⁴

Dengan dicetuskannya PP Nomor 71 Tahun 2010, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh organisasi pemerintahan untuk menerapkan basis akrual. Berdasarkan pasal 36, ayat 1 UU Nomor 17

²³ Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. cetakan pertama. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015) 12

²⁴ Khan, A. Mayes, S. 2009. Transisi ke Akuntansi Akrual, (online), ([http:// http://blog-pfm.imf.org/files/fad-technical-manual-2.pdf](http://blog-pfm.imf.org/files/fad-technical-manual-2.pdf))

disebutkan: ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikemabngkan dari SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada *International Publik Sector Accounting Standars (IPSAS)* dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Beberapa Negara sebenarnya kesulitan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrual ini dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- 1) SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
- 2) SAP sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis “Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. Neraca yang disusun sebenarnya sudah berbasisi akrual, walaupun Laporan Realisasi Anggaran masih berbasis kas.

- 3) Para pengguna yang sudah terbiasa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya. Artinya sebenarnya pengguna tinggal selangkah lagi untuk menggunakan basis akrual secara penuh.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem akuntansi berbasis kas, menghasilkan laporan yang dapat memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber dana. Karakteristik laporan keuangan berbasis kas adalah:

- a. Beban/biaya belum diakui dan dicatat sampai terjadinya pembayaran kas (arus kas keluar).
- b. Sebelum terjadi pengeluaran kas, tidak akan terjadi pengurangan dalam pendapatan.
- c. Pendapatan diakui dan dan dicatat saat terjadinya penerimaan kas (arus kas masuk).
- d. Laporan keuangan menunjukkan posisi kas yang ada pada saat itu.
- e. Tidak perlu membuat cadangan piutang tak tertagih (cadangan kerugian piutang).

Pencatatan berbasis kas mempunyai kelebihan-kelebihan, yaitu:

- a. Dapat menunjukkan sumber dana, alokasi dan penggunaan dana secara jelas.
- b. Mudah dipahami.

Selain mempunyai kelebihan, laporan keuangan yang disusun dengan berbasis kas juga memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain adalah:

- a. Hanya memfokuskan pada arus kas untuk periode berjalan.
- b. Adanya risiko pengakuan pendapatan yang terlalu tinggi pada suatu periode dimana terjadi penerimaan kas yang masih diperlukan adanya pemenuhan kewajiban.
- c. Adanya risiko pengakuan pendapatan yang terlalu rendah pada suatu periode dimana terjadi pengeluaran kas yang merupakan pembayaran di muka atas suatu kewajiban.
- d. Penghapusan piutang dilakukan secara langsung tanpa estimasi cadangan kerugian piutang.
- e. Tidak mencerminkan kinerja organisasi periodik yang sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk pertuturan atau tulisan dan tingkah laku suatu subjek yang boleh diperhatikan dengan sendirinya. Kerja langkah untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial dalam suatu penulisan yang bersifat naratif, artinya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari angka-angka. Mendeskripsikan suatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.²⁵

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk memaparkan, menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang proses yang sedang berlangsung dan efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi penelitian bertempat di Desa

²⁵ Lexi, J. Moleong, *metode Penelitian Kualitatif* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2012)130.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2018),7.

Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Jl. Kartini No. 102
Kemuningsari Kidul, Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, subjek penelitian yang dimaksudkan yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan, bagaimana data akan dicari sehingga validitasnya dapat dijamin. Penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah *purposive, purposive* yaitu penentuan sumber data pada orang yang di wawancarai yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.²⁷

Oleh karena itu peneliti mengambil jenis subyek penelitian dengan menggunakan *purposive* dengan tujuan agar data atau informasi yang diperoleh dari informan lebih dapat dipahami oleh peneliti dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang akan dijadikan informan diantaranya :

1. Kepala Desa Kemuningsari Kidul Ibu Hj. Dewi Kholifah merupakan informan yang diharapkan peneliti dapat memberikan gambaran tentang kepengurusan desa, serta pengelolaan kegiatan operasional yang ada di dasa.
2. Sekertaris Desa Ibu Luluk Farida merupakan informan yang membantu kepala desa dalam pencatatan keuangan desa.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014)*, 216

3. Bendahara Desa Bapak Bambang merupakan informan yang diharapkan peneliti dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan, penyajian, serta pelaporan keuangan yang ada di desa tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Saat mendiskusikan temuan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat menyempurnakan dan meningkatkan penyelidikan. Peneliti dapat menggunakan metode pengumpulan data yang tersedia. Menggunakan data untuk mengulangi berarti menggunakannya untuk menggunakan alat-alat tersebut dan menggunakannya lebih sering, cerita dengan data dan instruksi serta instruksi dan media dan lapisan.²⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan (observasi) yang dilakukan kali ini bertempat di Desa Kemuningsari Kidul.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, serta mencatat kejadian dan informasi dari responden yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian.²⁹

²⁸ Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Febi Press UIN-SU November 2016), 51

²⁹ Arfan Ikhsan, Metodologi Penelitian Bisnis, h. 123-124

3. Studi Pustaka

Tujuan penyelidikan yang dicapai merupakan sumber acuan pembahasan teori yang menjadi landasan pembahasan permasalahan penyelidikan ini. Investigasi terkait dengan investigasi ini. Penyelidik juga mengutip beberapa artikel yang ditampilkan di beberapa situs untuk melengkapi informasi.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisa data yaitu: data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verivication*, dengan penjelasan dibawah ini :³⁰

1. Data *Reduction*

Poin data yang tinggi dapat disebabkan oleh frekuensi pengulangan kata atau frasa di lapangan serta penggunaan kata-kata yang tidak bermakna secara ekstensif, sehingga pemilihan kata atau frasa tersebut harus dipertimbangkan dengan cermat. Oleh karena itu analisis data harus dilakukan melalui reduksi data. Proses reduksi data meliputi peringkasan dan pemilihan ciri-ciri utama, pemfokusan pada ciri-ciri yang penting, pencarian tema dan pola, serta pencarian pola sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang lebih banyak.

³⁰ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif", (Bandung: ALFABETA,2010), h.241

2. *Data Display*

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkannya. Penelitian kuantitatif dapat menggambarkan secara singkat penyajian data, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Sering digunakan ketika menyajikan informasi kualitatif bersama teks naratif. Pemberian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan di masa depan berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion drawing/verivication*

Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi validitasnya. Kesimpulan awal tidak akurat dan dapat dimodifikasi jika korespondensi yang kuat tidak ditemukan pada langkah pengambilan data berikutnya. Namun kesimpulan yang diambil dapat dipercaya jika didukung oleh data yang dapat diandalkan.

Metodologi atau urutan meta-analisis yang memenuhi syarat tidak memiliki pedoman penerapan yang jelas. Namun pada hakikatnya setiap unsur permasalahan yang timbul dalam analisis data harus diatasi melalui keterkaitan atau keterkaitan antar unsur tersebut. Data tersebut kemudian akan dianalisis untuk diambil sejumlah kesimpulan dan hasil berdasarkan upaya penelitian.³¹

Oleh karena itu, dalam proses pengolahan dan analisis data, langkah selanjutnya adalah mengembalikan data yang diperlukan dan

³¹ Soekanto, Op.Cit., hlm 36-37

menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif. Melalui analisis data, peneliti melakukan langkah sintesis induktif, suatu teknik analisis dasar dalam aturan tertentu, kemudian mengarahkan sistem secara keseluruhan.³²

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confrimability*) Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah.

Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak,³³ dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Penelitian ini menggunakan keabsahan data triangulasi dengan sumber untuk

³² Winardi. 1982. *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo.. 45

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,115.

menyesuaikan dan menguji data yang sudah di dapatkan oleh peneliti untuk penelitiannya di Desa Kemuningsari Kidul mengenai standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan operasional.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, berikut penjelasannya:

1. Tahap Pra-lapangan
 - a. Menyusun Rancangan Penelitian
 - b. Memilih objek Penelitian
 - c. Melakukan peninjauan/observasi terdahulu terkait obyek penelitian yang telah ditentukan
 - d. Mengajukan judul kepada fakultas ekonomi dan bisnis islam. Penelitian mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.
 - e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.
 - f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
 - g. Mengurus perizinan penelitian.
 - h. Mempersiapkan penelitian lapangan.
 - i. Mengurus Perizinan

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. Memahami Latar Belakang Penelitian

Untuk melancarkan penelitian, peneliti diharuskan membatasi latar belakang dan peneliti menyesuaikan penampilan, dilanjutkan dengan pengenalan hubungan peneliti dilapangan.

b. Memasuki Lapangan

Pada saat dilapangan dianjurkan menjalin hubungan dengan baik dan mempelajari bahasa setempat guna memudahkan peneliti menggali pengetahuan yang mereka punya.

c. Berperan serta mengumpulkan data.

- 1) Mengikuti dan memantau kegiatan.
- 2) Mencatat data.
- 3) Mengetahui tentang cara mengingat data.
- 4) Kejenuhan data.
- 5) Analisis data

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melalui beberapa tahapan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Secara umum keadaan mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap sifat penghuni suatu masyarakat. Kondisi dimana pun tertentu mungkin berdampak pada ras dan kepribadian suatu komunitas. Memahami *essensial la naturaleza* berarti memiliki ciri dan ciri khas negara-negara yang hidup di kawasan tertentu dan kawasan pembanding. Banyak faktor tertentu, seperti aspek sosial, ekonomi, geografis, dan agama, yang mempengaruhi komposisi penduduk suatu wilayah. Begitu pula yang terjadi di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat yang menempati Desa tersebut.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik dan kepribadian masyarakat Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember:

1. Sejarah Desa Kemuningsari Kidul

Sejarah Desa Kemuningsari Kidul telah ada sejak tahun 1887, dimana orang pertama yang memabat hutan ini bernama Kaki Emprit, Kaki Emprit inilah yang memberi nama Kemuningsari kidul konon ceritanya , kenapa dikasih nama Kemuningsari Kidul, mengingat di Desa ini banyak ditemui pohon bunga yang harum baunya, yaitu Pohon

Kemuning yang daunnya agak menyerupai beringain berbunga putih dan harum baunya.

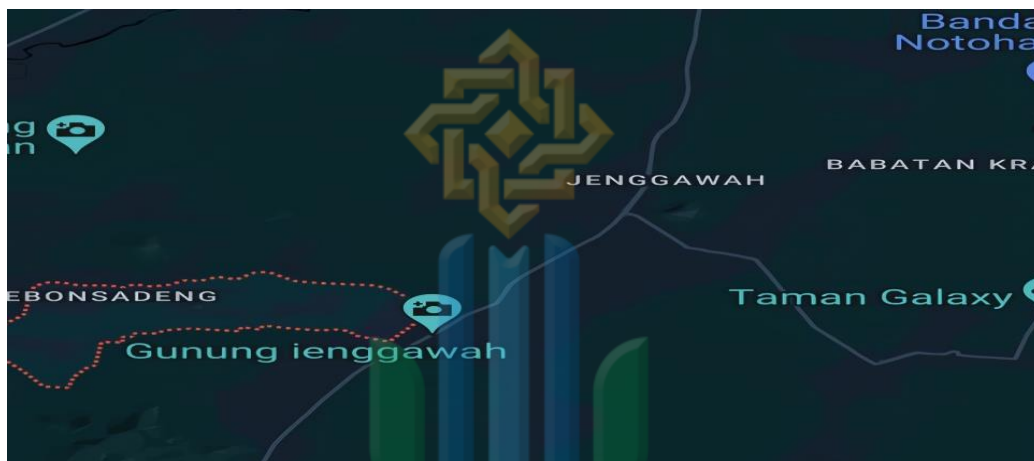
Desa Kemuningsari Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Luas wilayah Desa Kemuningsari Kidul yakni 74,29 ha. Sebagian besar wilayah Desa Kemuningsari Kidul adalah area persawahan dan pertanian, Desa Kemuningsari Kidul memiliki 8 Rukun Warga, 61 Rukun Tetangga dan 4 dusun, diantaranya yaitu Dusun Tegal Kalong, Dusun Tegal Gayam, Dusun Gumuk Rase, dan Dusun Kebonsadeng.³⁴

2. Letak Geografis Desa Kemuningsari Kidul

Desa Kemuningsari Kidul terlatak di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 9.800 jiwa dan memiliki luas wilayah sekitar 7.429 km². Desa Kemuningsari Kidul memiliki 4 dusun yaitu Dusun Tegal Kalong, Dusun Gumuk Rase, Dusun Kebon Sadeng dan Dusun Tegal Gayam. Pusat pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul terletak pada Balai Desa di Dusun Tegal Kalong. Letak geografis Desa Kemuningsari Kidul berada di daerah perbukitan dan mayoritas persawahan, sehingga kebanyakan masyarakat desa memilih berprofesi di bidang pertanian. Desa Kemuningsari Kidul memiliki potensi terkait di sektor pertanian, industri, maupun di bidang perdagangan.

³⁴Profil Desa Kemuningsari Kidul tahun 2019.

Gambar 4.1
Letak Geografis Desa Kemuningsari Kidul



Sumber : Google Maps

Batas wilayah Desa Kemuningsari Kidul:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ajung
2. Sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Desa Kertonegoro
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wuluhan

Jarak tempuh Desa Kemuningsari Kidul ke Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yaitu 3.6 km dengan sekitar waktu 6 menit. Sedangkan jarak tempuh Desa Kemuningsari Kidul ke pusat Kota/ Ibu kota Kabupaten yaitu 20 km dengan waktu yang bisa ditempuh sekitar 32 menit. Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk 10.02 Jiwa dan 2.993 Kepala Keluarga. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.810
2	Perempuan	5.210
	Jumlah	10.020

Sumber : Data Diolah, 2024

Dari data tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Kemuningsari Kidul berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 4.810 jiwa dan jumlah perempuan yaitu 5.210 jiwa dengan total keseluruhan 10.020 jiwa.³⁵ Masyarakat di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ini mayoritas penduduknya adalah keturunan Jawa, di mana masih kental dengan adat dan budaya. Misalnya dalam masalah tradisi peras yang digunakan pada saat dilangsungkannya acara pernikahan.

3. Visi dan Misi Desa Kemuningsari Kidul

a. Visi

Menyediakan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

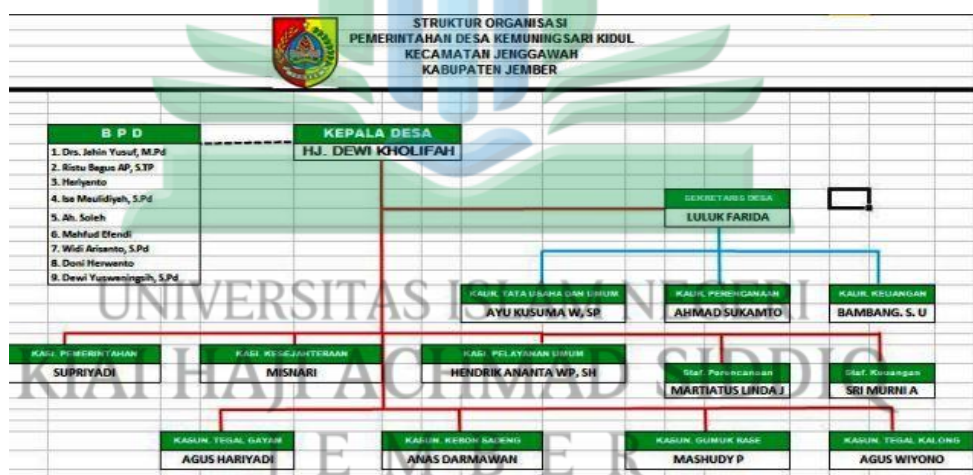
1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.

³⁵Profil Desa Kemuningsari Kidul tahun 2019.

3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

4. Struktural Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul



Sumber: <https://ppid-desajemberkab.go.id/desa/kemuningsarikidul>

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa

4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat beberapa wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan Kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan Pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggarakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

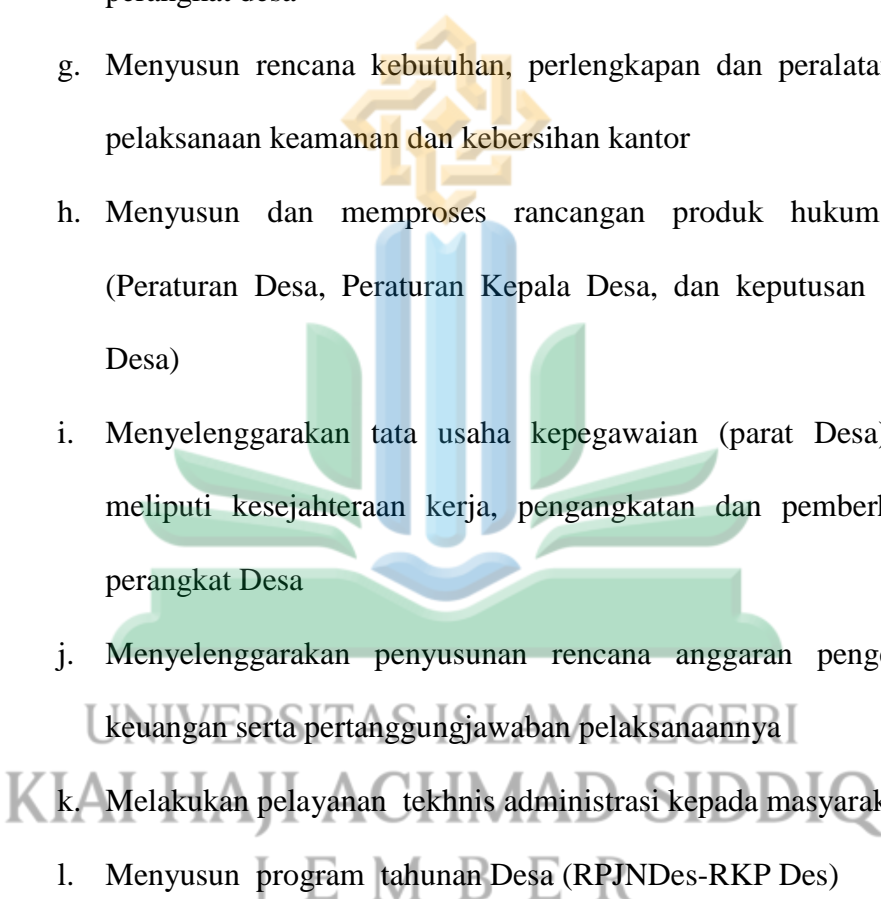
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul melaksanakan Tugas sesuai dengan UUD NO. 6 tahun 2014 yaitu :

1. Tugas Kepala Desa
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (perdes)

- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili Desa dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melakukan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut :

- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- c. Pelaksanaan administrasi umum
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat

- 
- f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
 - h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
 - i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (parat Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
 - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya
 - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
 - l. Menyusun program tahunan Desa (RPJNDes-RKP Des)
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan
3. Kaur Keuangan (Bendahara Desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki Bendahara lainnya adalah :

- a. Meneriama, menyimpan, menyetorkan, menetausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBD
- b. Membuat laporan pertanggung jawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaaban
- c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mebukukan uang/surat berharga dalam pengelolaanya
- d. Melakukan pengujian pembayaran berdasarka perintah
- e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya
- g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara
- h. Mengelola rekening tempat penyimpanan
- i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- j. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
- k. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
- l. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama

- m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian, setelah melakukan proses pengumpulan data dilapangan. Data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti yang telah diperoleh selama penelitian.

Data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Penyusunan Prosedur Laporan Keuangan Desa

Standar prosedur keuangan merupakan rangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, cara dan waktu yang harus dilakukan. Pada hakikatnya ketatalaksanaan standar prosedur keuangan diarahkan untuk melaksanakan penataan tatalaksanaan instansi pemerintah yang efektif dan efisien, salah satu upaya mewujudkan penyusunan dan implementasi tugas dan fungsi aparatur pemerintah berjalan dengan kebijakan yang berlaku pada masa pemerintahan tersebut.

Berdasarkan praktek penyusunan laporan keuangan akan menemukan perbedaan pemahaman dan variasi format dokumen laporan keuangan yang dihasilkan, tujuan dari pedoman agar memberikan

acuan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor bahkan mengevaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Sasaran yang diharapkan agar dapat dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki standar laporan keuangannya masing-masing;
- 2) Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam prosedur penyajian laporan keuangan pada pemerintah desa kemuningsari kidul, setiap pemerintah desa harus memiliki formulir atau data yang harus dimiliki dan dilengkapi. Adapun formulir atau data yang digunakan adalah sebagai berikut.³⁶

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan yang merupakan proses kegiatan desa sebagai bentuk transparansi anggaran pemerintah desa yang dilaksanakan setelah tahun anggaran sebelumnya selesai dilaksanakan. Berikut Laporan Realisasi APBD Kemuningsari Kidul tahun 2023.

³⁶ Bppk.depkeu.go.id, artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa

Gambar 4.3
LRA APBDes

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KEMUNINGSARIKIDUL KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.754.212.475,00	2.750.479.000,00	3.733.475,00
Dana Desa		1.735.939.000,00	1.735.939.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		99.520.000,00	99.520.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		769.753.475,00	766.020.000,00	3.733.475,00
Bantuan Keuangan Provinsi		149.000.000,00	149.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		6.649.353,00	7.335.370,30	686.017,30
JUMLAH PENDAPATAN		2.990.661.628,00	2.987.814.370,30	3.047.457,70
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.119.585.713,81	1.098.794.568,46	20.791.146,35
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.210.683.583,05	1.209.782.300,00	901.283,05
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		42.200.000,00	42.200.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		188.358.000,00	188.358.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.992.627.296,86	2.971.134.868,46	21.692.428,40
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.965.468,86)	16.679.501,84	(18.644.970,70)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		1.965.468,86	1.965.468,86	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		1.965.468,86	1.965.468,86	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	18.644.970,70	(18.644.970,70)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KEMUNINGSARI KIDUL, 31 Desember 2023
KEPALA DESA
H.J. DEWI KHOLIFAH

Dipindai dengan CamScanner

Sumber : Laporan APBDes Tahun Anggaran 2023

Format laporan realisasi APBD Pemerintahan Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah pendapatan dianggarkan dan realisasi yang digunakan tidak sama, sehingga hasil tahunan dari laporan APBD menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran defisit keuangan.

Laporan anggaran dari pendapatan dan beban pada APBD Kemuningsari Kidul menghasilkan defisit anggaran sedangkan, pada laporan realisasi penggunaan pendapatan dan beban menghasilkan jumlah akhir surplus pada Laporan Realisasi. Pembiayaan netto yang dihasilkan pada tahun berjalan memperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran yang diterima sama dengan nilai defisit anggaran yang telah diperkirakan.

Biaya terbesar yang banyak dikeluarkan bersumber dari SILTAP, insentif RT/RW dan honor staff desa merupakan pengeluaran terbesar pengeluaran dana terbanyak setiap bulannya, sedangkan biaya terendah yang dikeluarkan dari kegiatan operasional dan pengembangan UMKM.

c. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBD di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Terdapat surplus dan defisit APBD yang akan terjadi didalam kegiatan belanja dan pendapatan yang dihasilkan oleh keduanya. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar dari pada jumlah belanja.³⁷ Pada tabel dibawah ini menggambarkan bahwa selisih nilai belanja lebih besar dari pada perolehan pendapatan yang dihasilkan sehingga mendapati angka minus pada hasil akhir hal tersebut menjadikan APBD mengalami defisit.

³⁷ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan “Surplus APBD” Diakses 06 Agustus 2024, <https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-surplus-apbd-dan-bagaimana-tindak-lanjutnya>

Gambar 4.5
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemuningsari Kidul

Nomor : 4
Tahun : 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMUNINGSARIKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.745.851.898,00	2.754.212.475,00	8.360.577,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.649.353,00	6.649.353,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.982.501.251,00	2.990.861.828,00	8.360.577,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	670.463.356,00	667.722.035,00	(2.741.321,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	708.435.963,86	720.337.861,86	11.901.898,00	
5.3.	Belanja Modal	1.173.567.400,00	1.172.767.400,00	(800.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.984.466.719,86	2.992.827.296,86	8.360.577,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.965.468,86)	(1.965.468,86)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.965.468,86	1.965.468,86	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.965.468,86	1.965.468,86	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.965.468,86	1.965.468,86	0,00	

Sumber: <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/kemuningsarikidul>

Dalam prosedur keuangan desa, ada beberapa pihak pelaksana

unit kerja yang terlibat antara lain:

- a. Kepala Desa
- b. Sekertaris Desa
- c. Bendahara Desa

Prosedur dan penerapan standar akuntansi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Peneliti telah melakukan wawancara bersama Sekretaris Desa ibu

Luluk Farida Kemuningsari Kidul beliau mengatakan:

“Dalam pelaporan laporan operasional yang saya lakukan sebagai Sekertaris Desa, tiap bulannya saya harus konfirmasi kepada Bendahara Desa selaku yang mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang kemudian saya lakukan pelaporan kepada Kepala Desa.”

Dari pernyataan diatas bahwasanya terdapat koordinasi yang dilakukan antara kepala desa dan sekretaris desa dalam menyajikan

pelaporan keuangan, banyak pihak yang terlibat agar nilai transparansi dalam laporan keuangan di desa tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bendahara Desa Kemuningsari Kidul beliau mengatakan.

“ Ini adalah tugas dan kewajiban saya sebagai penyelenggara, baik dalam pendapatan maupun belanja. Saya kemudian mengkonfirmasi hal ini, yang kemudian memberi tahu pemimpin. Untuk memastikan bahwa saya menjalankan tugas saya secara akurat dan transparan pada saat pendaftaran agar kepala desa tidak menaruh kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap saya, saya akan menyampaikan laporan operasional yang disampaikan kepala desa kepada atasannya sebagai bagian dari keuangan. Kami masih menerima bantuan dari kecamatan, Untuk mencegah kesalahan serius dalam operasional.”

Koordinasi yang dilakukan keduanya merupakan bentuk upaya dan sinergi kepala desa dalam melaksanakan program-program pemerintah, sehingga membutuhkan koodinasi yang baik antar perangkat desa agar laporan keuangan sesuai dengan program yang ingin dicapai.

Penyusunan laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari pemerintah desa ke Kecamatan kemudian baru di sampaikan ke pihak Kabupaten. Peneliti mewawancarai bendahara desa Kemuningsari Kidul, beliau mengatakan.

“ Setelah SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) selesai lalu di verifikasi dan di sempurnakan oleh Tim pendamping Kecamatan sebelum diserahkan kepada pemerintah Kabupaten, karena selama ini kami hanya menyampaikan laporan realisasi terhadap penggunaan dana desa.”

Dari wawancara tersebut didapatkan laporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan akan verifikasi oleh kecamatan selaku tim pendamping untuk mengecek kelengkapan data yang ada sebelum diserahkan kepada pemerintah kabupaten.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Kemuningsari Kidul, dari hasil wawancara beliau mengatakan.

“ Karena bendahara desa bertanggung jawab mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, kami menugaskannya semua tugas yang relevan. Namun, kami terus menerima dukungan dari Kabupaten untuk menyerahkan laporan operasional dan keuangan lainnya kepada Wali Amanat, karena kami khawatir bahwa pelaporan operasional mungkin tidak akurat. Informasi tersebut merupakan langkah permintaan untuk langkah yayasannya selanjutnya, Anda dapat mentransfer informasi keuangan alternatif jika tidak disertai dengan tangan. Yang pertama disiapkan adalah laporan rencana anggaran penggunaan uang rakyat, dan hal itu dilakukan dari awal sampai akhir. ”

Laporan keuangan yang disusun oleh bendahara desa sebagai petugas pencatatan, tidak berhenti disitu laporan yang telah di buat akan di tinjau dan di verifikasi oleh wali amanat kemudian dijadikan laporan siap saji yang akan diserahkan pada pemerintahan kabupaten.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 tahun 2010 Dalam

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Kemuningsari Kidul sudah terlaksana yang dibuat oleh pemerintahan Desa Kemuningsari Kidul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Dewi Kholifah sebagai Kepala Desa Kemuningsari Kidul beliau mengatakan.

“Untuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa ini sudah terlaksana, untuk laporan keuangan bisa di lihat di web desa dan untuk basis akuntansi yang kita pakai sudah memakai basis akuntansi yang sesuai dengan PP”.

“Semua tugas mengenai pencatatan pendapatan ataupun pengeluaran kita serahkan kepada bendahara desa karna memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya, namun dalam pelaporan kita memang masih dibantu oleh pihak Kecamatan, karna memang ditakutkan adanya terjadi kesalahan dalam penyusunan pelaporan apabila tidak didampingi oleh pihak kecamatan, karna pelaporan ini menjadi tahap untuk pengajuan dana tahap berikutnya. Untuk pertama sekali yang dibuat adalah laporan rencana anggaran biaya penggunaan Dana Desa, ini dilakukan mulai tahap pertama sampai akhir, kemudian setelah pembangunan selesai dilaksanakan kita kembali melaporkan reaslisasi anggaran dan yang terakhir kita menyampaikan laporan diluar surat- surat permohonan ataupun yang lainnya”

Karena pemerintah kabupaten selalu memberikan arahan, terbukti pelaksanaan laporan keuangan desa sudah dipahami secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan. Penerapan di lapangan, yang menunjukkan bahwa setiap dolar yang dikeluarkan telah dipertanggung jawabkan secara fisik dan finansial, mendukung hal ini. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan laporan keuangan desa sudah di pahami dan mengertitentang tata kelola administrasi keuangankarena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan.

C. Pembahasan Temuan

1. Penyusunan Prosedur Laporan Keuangan Desa

Penyusunan prosedur Laporan keuangan desa dalam sasaran pencapaian tugas dan fungsi aparat pemerintah pada Desa Kemuningsari Kidul yakni :

- a. Pada Desa Kemuningsari Kidul dalam menggunakan penerapan pelaksanaan prosedur laporan keuangan, pemerintah menggunakan Laporan Pelaksanaan Anggaran (Basis Kas), pada desa kemuningsari kidul menggunakan standar laporan keuangan yakni Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD, Laporan Rencana Dana ADD desa dan Laporan APBN
- b. Penyempurna proses penyelenggara pemerintah dalam hal ini agar program pemerintah desa menjadi terlaksana dan berjalan maka koordinasi antar perangkat desa dan pemerintah kabupaten harus selaras dengan program yang ingin di capai dan dijalankan oleh pihak pemerintah kabupaten. Pada Desa Kemuningsari kidul Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pemersatu program yang dijalankan oleh pemerntahan karena itu LRA dalam pelaksanaannya harus menggunakan jalur struktural yakni pemerintah Desa Kemuningsari Kidul berkoordinasi dengan pihak kecamatan yang bertugas memverifikasi LRA dan menjadi tim pendamping dari perangkat Desa Kemuningsari kidul yang kemudian LRA diserahkan kepada pihak kabupaten.

2. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa belum sepenuhnya terlaksanakan karena penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Desa Kemuningsari Kidul hanya sebatas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 tahun 2010, mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik., hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Laporan Keuangan

No	Jenis Laporan Keuangan	Ada	Tidak
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	√	-
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)	-	√
3	Neraca	-	√
4	Laporan Operasional (LO)	-	√
6	Laporan Arus Kas (LAK)	-	√
7	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	-	√
8	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	-	√

Sumber : Data Diolah

Dari data yang dikumpulkan diperoleh penerapan SAP pada Desa Kemuningsari Kidul sudah terlaksana dengan baik dan basis akuntansi yang dipakai belum menerapkan akuntansi akrual basic, untuk spesifikasi laporan keuangan Desa ini belum sepenuhnya melaksanakannya karena untuk penyajian laporan keuangannya desa hanya membuat Laporan Realisasi penggunaan dana desa saja yang dibuat oleh bendahara desa dan untuk basis akuntansi yang dipakai belum memakai basis akuntansi yang akrual .

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari isi pembahasan dan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Kemuningsari Kidul Kabupaten Jember dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini :

1. Penyusunan prosedur laporan keuangan pada Desa Kemuningsari Kidul rupanya tidak menggunakan laporan keuangan secara konkrit keseluruhan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kebutuhan yang diperlukan sudah mencukupi baik dari pihak internal dan eksternal sehingga desa hanya membuat beberapa laporan keuangan yang mencukupi kebutuhan *stakeholder* dan berikut beberapa laporan keuangan yang digunakan oleh Desa Kemuningsari Kidul : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Rencana Dana ADD desa dan Laporan APBN.

Agar program pemerintah desa menjadi terlaksana dan berjalan maka koordinasi antar perangkat desa dan pemerintah kabupaten harus selaras dengan program yang ingin di capai dan dijalankan oleh pihak pemerintah kabupaten.

2. Dalam Penerapan Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun 2010, penerapan SAP pada desa Kemuningsari Kidul sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada pada Desa

Kemuningsari Kidul. Spesifikasi laporan keuangan Desa ini belum sepenuhnya melaksanakannya karena untuk penyajian laporan keuangannya desa hanya membuat Laporan Realisasi penggunaan dana desa saja yang dibuat oleh bendahara desa dan untuk basis akuntansi yang kita pakai belum memakai basis akuntansi yang aktual .

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, Untuk memperoleh kinerja peraturan audit pemerintah yang memadai dan optimal pada tahun-tahun berikutnya, perlu dilakukan perbaikan di berbagai bidang. Anda dapat menawarkan saran berikut kepada peneliti:

1. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan dalam tahap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah Desa Kemuningsari Kidul harus sepenuhnya menerapkan PP No. 71 tahun 2010 dimana dengan melengkapi komponen laporan keuangan berdasarkan undang-undang tersebut.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, semoga untuk peneliti selanjutnya bisa menjadi sumber penelitian dan mendapatkan dan memiliki saran yang lebih baik dari saran peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2008) *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga Cetakan ketiga: Salemba Empat, Jakarta.;
- Amelia Fahira, “Analisis Penerapan PSAP No. 12 Tentang Laporan Operasional Pada Inspektorat Kabupaten Jayapura “, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting*, Vol. 1 No. 1 Mei 2020
- Arfan Ikhsan. Misri, (2012) “Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis”, (Medan: Citapustaka Media Perintis).
- Billy Rivaldi Panggalila, Sifrid S. Pangemanan Jessy D. L, Warongan,” Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara “ *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 04 Tahun 2018
- Choirotul Ummayyah, Ana Sopanah, Hartini P. Pawestri, (2022) “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Bakorwil III Malang “, *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)* 2 (1),
- Dkk, Hardani, (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,)
- Erlina, (2017) et.al, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- E Masrunik, N I Mauliyah, (2019) “Dasar Akuntansi : Suatu Pengantar” Penerbit NEM
- E Puspitasari, (2019) “Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa” (*Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi*) 7.
- Frenly Rombebunga, David PE Saerang, Novi Swandari Budiarmo, (2018) “Evaluasi penyajian laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010”, *JURNAL RISET AKUNTANSI* 13 (04),
- Jenny Billy Massie, (2018) “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja LANGSUNG dan Transmigrasi Kota Bitung “, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4 (2).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2017) “Buku saku Dana Desa”, (Jakarta; Menteri Keuangan, November).

- Misri, Ikhsan Arfan, “*Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*”, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012),
- Moleong J Lexy, (2017) “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- M. Dimas satrio, Indrawati Yuhertina, dan Ardi Hamzah, (2018) “Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Jombang”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18 (1)
- N Masruroh dkk, (2018) “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru, Jember, Indonesia” *Fenomena* 17 (2).
- N Masruroh, S Suprianik, (2023) “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif” *Global Education Journal* 1(2)
- N Masruroh, N Hidayat, RJ Fauzan, NI Romadhoni, “Internalisasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Desa (SIPD) Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat” *Eastasouth Journal Of Impactive*
- Nur Ahmadi Bi Rahmani, (2016) *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Febi Press UIN-SU November).
- Nyoman Shuida (2016) “Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa”, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni).
- Putri Sundry, “ Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau “ UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020
- Pangalila Billy Rivaldy, dkk., Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas
- Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara: *Jurnal Penelitian, Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara*, 2016. Hal 2. *Jurnal Berakala Ilmiah Efisiensi* , Volume 16 No.04 Tahun 2016
- Rahmi Bi Ahmadi Nur, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Febi Press UIN-SU November 2016), h. 51
- Risnarningsih, “Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual”, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, 2022

- Sugiono, (2010) "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif", (Bandung: ALFABETA,).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2016), 209-210
- Sri ratna Dwi Lestari, Arik Susbiyani, "Analisis Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang ",(Skripsi,Universitas Muhammadiyah Jember, 2018)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember, 2019), 46.
- Venna Maria, Jantje tinangon dan Novi S. Budiarso, "Evaluasi penerapan system pengendalian penerimaan kas (study kasus pada dinas pendapatan daerah Kota Manado)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16 (3), 2018
- Winardi. 1982. *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo.
- Yohana Cresensia Mutiara, Minarni A Dethan, dan Nikson Tameno, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1 (7), 2022
- Yunita Kurnia Shanti," Analisis Penerapan Basis Akrual Atas Satandar Akuntansi Pemerintah No. 71 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputan Timur) " *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* Vol.1,No.1, Januari 2018
- Peraturan Pemerintah NO. 71, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP NO. 12
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman keuangan desa
- Peraturan Pemerintah NO. 71, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
- UUD No.6 Tahun 2014
- PSAP No. 12 Tahun 2010 Paragraf 1
- PSAP No.12 Tahun 2010 Paragraf 2
- PSAP No.12 Tahun 2010 Paragraf 3-4
- PSAP NO. 12 Tahun 2010
- PSAP No.12 Tahun 2010 Paragraf 5

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p>Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Desa Kemuningsari Kidul</p>	<p>Penerapan Standar Akuntansi</p>	<p>Penerapan standar akuntansi pemerintah dan penyesuaian terhadap PP No. 71 tahun 2010</p>	<p>1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif 2. Lokasi penelitian Desa Kemuningsari Kidul 3. Teknik pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis data a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 5. Keabsahan data : Trianggulasi Sumber</p>	<p>1. Bagaimana penyusunan prosedur Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul? 2. Apakah penyusunan Laporan Keuangan pada Desa Kemuningsari Kidul telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Berbasis Akrual ?</p>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Soffiana Safitri
NIM : E20193176
Program Studi : Akuntansi Syariah
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 22 November 2024

Saya yang menyatakan



Sinta Soffiana Safitri
NIM. E20193176

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Wawancara

1. Apakah pemerintah desa telah menerapkan PP No. 71 tahun 2010 dalam laporan keuangan desa?
2. Jenis Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa?
3. Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?
4. Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan keuangan?
5. Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010?
6. Apakah dalam pelaporan laporan keuangan sudah melalui jalan yang struktural yang di tentukan?
7. Siapa pihak yang menilai kinerja laporan keuangan tahunan di desa?

B. Pedoman Dokumentai

1. Sejarah Desa Kemuningsari Kidul
2. Letak Geografis Desa Kemuningsari Kidul
3. Visi dan Misi Desa Kemuningsari Kidul
4. Struktur Pemerintah Desa Kemuningsari Kidul
5. Uraian tugas Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Staf Desa Kemuningsari Kidul

JURNAL KEGIATAN PENELITIA

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	10 Maret 2023	Penyerahan surat izin penelitian ke bagian akademik Febi Uinkhas Jember	
2	06 Oktober 2023	Wawancara dengan ibu HJ. Dewi Kholifah selaku kepala desa Kemuningsari Kidul	
3	07 Oktober 2023	Wawancara dengan ibu Luluk Farida selaku sekretaris desa Kemuningsari Kidul	
4	08 Oktober 2023	Wawancara dengan bapak Bambang. S. U selaku bendahara desa Kemuningsari Kidul	
5	30 November 2023	Konsultasi hasil wawancara dengan ibu HJ. Dewi Kholifah selaku kepala desa Kemuningsari Kidul	
6	31 Oktober 2024	Meminta surat selesai penelitian kepada ibu HJ. Dewi Kholifah selaku kepala desa Kemuningsari Kidul	

Kemuningsari Kidul 31 Oktober 2024

Kepala Desa



HJ. DEWI KHOLIFAH 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan IJin Penelitian

10 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Kemuningsari Kidul
Jl. Kartini no. 102 kemuningsari kidul, Jenggawah, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Sinta Soffiana Safitri
NIM : E20193176
Semester : IX (sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syari'ah
Prodi : Akuntansi Syari'ah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Operasional di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA KEMUNINGSARI KIDUL

SURAT KETERANGAN

No. 470/847 / 35.09.16.2001/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama lengkap : HJ. DEWI KHOLIFAH
Jabatan : KEPALA DESA KEMUNINGSARI KIDUL

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : SINTA SAFFIANA SAFITRI
NIM : E20193176
Prodi : Akuntansi Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember
Alamat : Desa Bangun Harja RT 13 RW 04
Kec. Seruyan Hilir Timur
Kab Seruyan – Kalimantan Tengah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswi Tersebut telah Melakukan Penelitian di Pemerintah desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember terkait Administrasi Pemerintahan Desa, yang mana penelitian tersebut dilakukan pada Tanggal 10 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan akan dipergunakan sebagaimana Perlunya.

Kemuningsari Kidul, 31 Oktober 2023

Kepala Desa

HJ. DEWI KHOLIFAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Sinta soffiana safitri
NIM : E20193176
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Desa
Kemuningsari Kidul.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 November 2024
Operator Drillbit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Hi. Mariyah Ulfah, M.El)
NIP.197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Soffiana Safitri

NIM : E20193176

Semester : 11 (Sebelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 21 November 2024
Kordinator Prodi. Akuntansi Syariah,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak
NIP. 198803012018012001

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama ibu Kades Kemuningsari Kidul



Wawancara bersama ibu Sekdes Kemuningsari Kidul



Wawancara bersama Bendahara Desa Kemuningsari \Kidul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Sinta Soffiana Safiri
NIM : E20193176
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal, Lahir : Bangun Harja, 04 Maret 2001
Alamat : Rt 013/04, Bangun harja, Seruyan Hilir Timur,
Seruyan, Kalimantan Tengah
Agama : Islam
No Telepon : 081520436283
Email : sintasoffianasafitri033@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 2017-2019 : SMAN 2 KUALA PEMBUANG
2. 2014-2016 : SMP SATU ATAP 2 SERUYAN HILIR TIMUR
3. 2008-2013 : SDN 1 NATAI KONDANG